**A white cover with blue and black text

AI-generated content may be incorrect.**

**Sponsor Proyek:**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Nama** | **Jabatan** | **Kontak (Email)** |
| Mokhamad Nizar Zulfikar, S.Kom. | Pranata Komputer Ahli Pertama | nizarzulfikar@bandungbaratkab.go.id |

**Daftar Isi**

[1. Ringkasan Eksekutif 4](#_Toc192524934)

[2. Pernyataan Masalah 4](#_Toc192524935)

[3. Tujuan 4](#_Toc192524936)

[4. Solusi yang Diusulkan 5](#_Toc192524937)

[5. Ruang Lingkupp 5](#_Toc192524938)

[6. Manfaat dan Dampak 5](#_Toc192524939)

[7. Biaya dan Sumber Daya 5](#_Toc192524940)

[8. Analisis Risiko 6](#_Toc192524941)

[9. Metrik Keberhasilan 6](#_Toc192524942)

[10. Kesimpulan dan Rekomendasi 6](#_Toc192524943)

**Judul Proyek :** Penerapan Tata Kelola Data untuk Meningkatkan Kualitas dan Akurasi Data Pokok Pendidikan (DAPODIK) di Kabupaten Bandung Barat*.*

**Sponsor Proyek :** M. Nizar Zulfikar, S.Kom, Pranata Komputer Ahli Pertama, nizarzulfikar@bandungbaratkab.go.id

**Versi :** 0.0

**Tanggal :** 7 Maret 2025

**Perkiraan Tanggal Mulai dan Selesai :** mulai tanggal 10 Maret 2025 hingga 10 Maret 2027

## 1. Ringkasan Eksekutif

Seiring dengan meningkatnya kompleksitas pengelolaan data pendidikan dan pentingnya data yang akurat untuk mendukung kebijakan pendidikan di daerah, Dinas Pendidikan Kabupaten Bandung Barat menghadapi tantangan serius terkait kualitas, konsistensi, dan kepemilikan data pada sistem Dapodik. Ketidaksesuaian data antarsatuan pendidikan, lemahnya mekanisme validasi, serta rendahnya literasi data menjadi hambatan utama dalam perencanaan berbasis data. Inisiatif Program Tata Kelola Data Dapodik ini dirancang untuk memperkenalkan kerangka kerja tata pamong data yang berfokus pada penetapan peran dan tanggung jawab, peningkatan kualitas data, serta pemenuhan standar regulasi nasional. Dengan membentuk struktur pengelolaan data yang terkoordinasi dan sistematis, program ini bertujuan untuk menciptakan budaya data yang sehat dan mendukung pengambilan keputusan yang lebih tepat, transparan, dan efisien. Manfaat utama dari program ini meliputi peningkatan kepercayaan terhadap data Dapodik, efisiensi proses distribusi bantuan pendidikan seperti BOS dan PIP, serta kesiapan menghadapi integrasi data lintas sektor menuju implementasi kebijakan Satu Data Indonesia.

Kabupaten Bandung Barat telah menginisiasi implementasi Satu Data Indonesia melalui penerbitan Peraturan Bupati Nomor 19 Tahun 2022 tentang Satu Data, pembentukan Forum Satu Data melalui Keputusan Bupati Bandung Barat Nomor : 10.3.3.2/Kep.56-Bappelitbangda/2024 tentang Pembentukan Forum Satu Data Kebupaten, Bandung Barat serta pembentukan Tim Pengelola Data Statistik Sektoral melalui Keputusan Bupati Bandung Barat Nomor : 10.3.3.2/Kep.57-Diskominfotik/2024 tentang Pembentukan Tim Pengelola Data Statistik Sektoral Perangkat Daerah. Namun, masih terdapat beberapa tantangan utama dalam penerapan *Data Governance*, khususnya pada Data Pokok Pendidikan (DAPODIK).

Data Pokok Pendidikan (DAPODIK) merupakan sumber data utama pendidikan di Indonesia yang mencatat informasi tentang satuan pendidikan, peserta didik, pendidik, dan sarana prasarana. Data ini digunakan untuk menyalurkan dana Bantuan Operasional Sekolah, memberikan tunjangan profesi guru, serta merencanakan program pendidikan. Dapodik juga berfungsi sebagai basis untuk pemantauan kualitas pendidikan melalui sistem rapor pendidikan. Sebagai rujukan utama bagi pemerintah pusat dan daerah, Permasalahan utama DAPODIK meliputi ketidaksesuaian data sarana dan prasarana dengan kondisi lapangan, banyaknya data siswa PAUD-SD yang invalid karena belum memiliki Akta Lahir, serta duplikasi data akibat kurangnya integrasi dengan data kependudukan. Kondisi ini berdampak terhambatnya pengambilan keputusan dan alokasi anggaran di sektor Pendidikan karena DAPODIK belum dapat menggambarkan kondisi sebenarnya sehingga memerlukan verifikasi ulang ke lapangan.

Penerapan tata kelola data dalam DAPODIK bertujuan untuk meningkatkan kualitas dan akurasi data dengan memastikan standar pengelolaan yang jelas, meningkatkan koordinasi antar pemangku kepentingan, serta mengoptimalkan pemanfaatan data untuk mendukung kebijakan pendidikan yang lebih efektif dan tepat sasaran.

## 2. Pernyataan Masalah

Beberapa permasalahan utama yang dihadapi dalam tata kelola data pokok Pendidikan (DAPODIK) di Kabupaten Bandung Barat meliputi:

1. Ketidaklengkapan dan Ketidakvalidan Data Siswa PAUD–SD seperti banyaknya data siswa PAUD-SD yang *invalid* karena belum memiliki Akte Lahir.
2. Ketidaksesuaian Data Sarana dan Prasarana karena kesalahan pada pemutakhiran data kerusakan bangunan (sarpras)sekolah dan serta kesalahan pada penilaian tingkat kerusakan bangunan dan ruangan.
3. Terjadi banyak kasus duplikasi dan data tidak valid karena tidak terintegrasinya Dapodik dengan data kependudukan dan kesejahteraan sosial. Contohnya kesalahan data NISN (Nomor Induk Siswa Nasional), kesalahan NIK (Nomor Induk Kependudukan), Kesalahan tanggal lahir, Penghasilan orang tua melebihi batas, Data di Dukcapil belum terupdate, NIK tidak terdaftar di DTKS (Data Terpadu Kesejahteraan Sosial), Kesalahan input dari operator sekolah, NIK masih menggunakan data lama yang dapat menghambat penyaluran Program Indonesia Pintar (PIP) yang memberikan bantuan berupa uang tunai, perluasan akses pendidikan dan kesempatan belajar.

## 3. Tujuan

Penerapan tata kelola data di Kabupaten Bandung Barat bertujuan untuk:

1. Meningkatkan akurasi dan konsistensi data siswa, sarana, dan prasarana pendidikan, sehingga seluruh entitas data mencerminkan kondisi faktual di lapangan.
2. Menjamin validitas data siswa melalui integrasi dan sinkronisasi dengan data kependudukan (Dukcapil), guna memastikan keabsahan NIK, NISN dan data keluarga.
3. Memastikan data sarana dan prasarana sekolah mencerminkan kondisi riil, sebagai dasar perencanaan rehabilitasi dan pengalokasian anggaran pendidikan yang tepat sasaran.
4. Meningkatkan efisiensi dalam proses pengumpulan, pemutakhiran, dan pemanfaatan data pendidikan, untuk mendukung perumusan kebijakan berbasis data (evidence-based policy).
5. Membangun tata pamong data pokok pendidikan (Dapodik) yang lebih terstruktur dan berkelanjutan, guna menunjang efektivitas penyaluran program seperti Bantuan Operasional Sekolah (BOS) dan Program Indonesia Pintar (PIP).

## 4. Solusi yang Diusulkan

Untuk mengatasi berbagai permasalahan dalam pengelolaan data pokok pendidikan (Dapodik), Pemerintah Kabupaten Bandung Barat mengusulkan penerapan pendekatan tata kelola data yang terstruktur dan berkelanjutan. Solusi yang diusulkan mencakup pengembangan regulasi dan pedoman tata kelola data DAPODIK akan menjadi langkah awal dalam memastikan keteraturan dan kualitas data pendidikan. Regulasi ini akan mengatur prosedur pengelolaan, tanggung jawab tiap pihak, serta mekanisme pembaruan data agar tetap relevan. Selain itu, sistem interoperabilitas antara DAPODIK dan data kependudukan (Dukcapil) perlu dibangun guna menghindari duplikasi dan memastikan bahwa setiap siswa memiliki identitas yang valid. Untuk memastikan keakuratan data sarana dan prasarana, diperlukan audit dan validasi berkala yang melibatkan pihak sekolah dan Dinas Pendidikan.

Solusi yang diusulkan dalam proyek ini adalah penyusunan kerangka kerja tata kelola data (data governance framework) untuk data Pokok Pendidikan (DAPODIK), dengan fokus pada data siswa PAUD–SD serta data sarana dan prasarana pendidikan. Kerangka kerja ini dirancang untuk menjawab tantangan mendasar dalam tata kelola, seperti ketidakjelasan kepemilikan data, lemahnya standar kualitas data, serta belum terbangunnya mekanisme interoperabilitas antar sistem. Kerangka ini akan mengatur peran dan tanggung jawab pihak terkait (seperti data owner, data steward, dan custodian), menetapkan standar dan metadata, serta menyusun kebijakan validasi dan pertukaran data sesuai dengan ketentuan Perpres No. 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia dan regulasi teknis DAPODIK dari Kemendikbudristek.

Sebagai bagian dari solusi, akan dilakukan audit dan validasi berkala terhadap data sarana prasarana dan data siswa, dengan pelibatan aktif sekolah dan Dinas Pendidikan, guna meningkatkan akurasi dan keterandalan data di tingkat daerah. Selain itu, upaya peningkatan kapasitas SDM, khususnya operator sekolah, akan menjadi prioritas melalui program pelatihan berbasis tata pamong data yang mencakup pemahaman tentang standar, tanggung jawab data, dan pemanfaatan data untuk pengambilan keputusan.

## 5. Ruang Lingkup

Proyek ini mencakup penerapan tata kelola data pada urusan pendidikan, dengan fokus pada Data Pokok Pendidikan (DAPODIK), khususnya untuk domain data peserta didik dan sarana-prasarana pendidikan dasar (PAUD–SD).

## 6. Manfaat dan Dampak

Penerapan tata kelola data pendidikan di Kabupaten Bandung Barat diharapkan memberikan berbagai manfaat, diantaranya yaitu :

1. Meningkatkan validitas dan akurasi data peserta didik, sehingga distribusi dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) dan Program Indonesia Pintar (PIP) menjadi lebih tepat sasaran dan berbasis data yang terverifikasi.
2. Meningkatkan kualitas dan keterandalan data sarana dan prasarana sekolah sebagai dasar perencanaan pembangunan dan alokasi anggaran pendidikan yang lebih akurat.
3. Mengurangi duplikasi dan kesalahan data, melalui penerapan standar validasi dan integrasi data dengan Dukcapil, sehingga mendukung efisiensi administrasi dan pemrosesan bantuan pendidikan.
4. Membangun kepercayaan terhadap data pendidikan di kalangan pemangku kepentingan daerah, yang mendorong penggunaan data dalam pengambilan keputusan..

## 7. Biaya dan Sumber Daya

Total biaya yang dibutuhkan untuk penerapan tata Kelola data di Kabupaten Bandung Barat diperkirakan sebesar Rp 2.250.000.000 dalam dua tahun, mencakup perancangan regulasi, dukungan Tim Teknis IT, serta Pelatihan dan peningkatan kapasitas SDM.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Komponen** | **Detail** | **Estimasi Biaya (Rp)** |
| Penyusunan regulasi dan kebijakan tata kelola data | Pengembangan framework tata kelola DAPODIK | 300,000,000 |
| Pengembangan sistem integrasi | Pembangunan Interoperabilitas dengan Dukcapil | 600,000,000 |
| Audit dan validasi data | Pengecekan data sarana prasarana dan data siswa. (*cleaning data*) | 600,000,000 |
| Pelatihan dan peningkatan kapasitas SDM | Sosialisasi dan pendampingan operator sekolah dan staf Dinas Pendidikan selama proyek berjalan | 600,000,000 |
| Monitoring dan evaluasi berkala | Audit *data governance*, evaluasi kebijakan, dan pengukuran efektivitas implementasi | 150,000,000 |
| **Total** | | **2,250,000,000** |

## 8. Analisis Risiko

Dalam menginisiasi dan mengimplementasikan program tata kelola data DAPODIK di Kabupaten Bandung Barat, terdapat sejumlah potensi risiko yang perlu diidentifikasi sejak awal agar tidak menghambat pencapaian tujuan strategis. Risiko-risiko ini berkaitan dengan aspek kelembagaan, kebijakan, teknologi, serta kesiapan budaya organisasi terhadap perubahan. Berikut adalah analisis risiko dan strategi mitigasi terhadap rencana penerapan tata Kelola data DAPODIK:

| **Risiko** | **Langkah Mitigasi** |
| --- | --- |
| Resistensi terhadap perubahan proses tata kelola data | Melakukan sosialisasi dan pelatihan rutin mengenai prinsip tata kelola data, serta memberikan pendampingan teknis kepada operator dan pemangku kepentingan untuk menumbuhkan pemahaman dan komitmen bersama. |
| Ketidaksiapan kelembagaan dalam menjalankan peran tata kelola (CDO, Data Steward, dll.) | Menetapkan struktur tata kelola data yang jelas dalam bentuk tim lintas fungsi dan menyusun mandat formal melalui regulasi daerah atau SK kepala dinas sebagai legitimasi kelembagaan. |
| Keterbatasan sumber daya manusia dan anggaran untuk implementasi penuh | Melakukan perencanaan bertahap dan memprioritaskan penerapan tata Kelola data pada bagian yang krusial terlebih dahulu. |

## 9. Metrik Keberhasilan

Beberapa indikator keberhasilan dalam implementasi tata kelola data meliputi:

|  |
| --- |
| **Metrik** |
| 1. Persentase peningkatan kualitas data siswa PAUD-SD dalam DAPODIK yang telah tervalidasi dan sesuai dengan data Dukcapil (target: minimal 75% dalam 1 tahun). |
| 1. Kepatuhan terhadap standar tata kelola data yang ditetapkan dalam kebijakan daerah dan prinsip Satu Data Indonesia. |
| 1. Waktu rata-rata validasi data sarana-prasarana menurun berkat pelaksanaan audit dan koordinasi lintas unit (target: efisiensi waktu proses validasi sebesar 30% dalam 1 tahun). |

## 10. Kesimpulan dan Rekomendasi

Implementasi tata kelola data pada DAPODIK di Kabupaten Bandung Barat merupakan langkah strategis untuk meningkatkan validitas, integritas, dan keterandalan data pendidikan. Permasalahan seperti data siswa yang tidak sinkron dengan Dukcapil, ketidaksesuaian data sarana-prasarana, serta lemahnya struktur kepemilikan data di tingkat sekolah telah menghambat pengambilan keputusan dan penyaluran program secara tepat sasaran. Melalui penyusunan kerangka kerja tata kelola data, integrasi dengan sistem kependudukan, dan pelaksanaan validasi berkala, kualitas data dapat ditingkatkan untuk mendukung perencanaan pendidikan yang lebih akurat dan berkelanjutan.

Rekomendasi utama dalam proyek ini mencakup:

1. Pembentukan kelembagaan tata kelola data di lingkungan Dinas Pendidikan dan sekolah (termasuk penetapan peran CDO, data steward, dan data owner).

2. Penyusunan kebijakan dan SOP tata kelola data yang selaras dengan prinsip Satu Data Indonesia.

3. Penguatan kolaborasi lintas lembaga (Dinas Pendidikan, Disdukcapil, sekolah) melalui forum koordinasi tetap.

4. Pengembangan kapabilitas sumber daya manusia melalui pelatihan dan peningkatan literasi tata pamong data.

5. Pengalokasian anggaran yang terencana untuk mendukung implementasi bertahap berdasarkan kapabilitas prioritas.

Dengan implementasi ini, pengambilan keputusan berbasis data dalam sektor pendidikan dapat dilakukan secara lebih tepat, efisien, dan terukur. Hal ini sekaligus menjadi fondasi dalam mendukung kualitas layanan pendidikan yang lebih baik di Kabupaten Bandung Barat dan memperkuat kesiapan daerah terhadap inisiatif transformasi digital dan Satu Data Nasional.